

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 LATAR BELAKANG

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Selain itu perencanaan adalah suatu proses kegiatan pengambilan keputusan oleh pemerintah bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan memperhitungkan sumberdaya, IPTEK dan memperhatikan perkembangan global.

Tujuan dari penyusunan perencanaan adalah untuk menjamin agar kegiatan pembangunan baik di pusat maupun di daerah berjalan secara efektif, efisien, berkesinambungan, berkelanjutan dan tepat sasaran. Dalam rangka mencapai pembangunan yang baik, maka diperlukan suatu dokumen perencanaan untuk jangka panjang, jangka menengah dan tahunan. Dalam melaksanakan kegiatan pembangunan di semua bidang terlebih dahulu harus dilakukan proses perencanaan yang sistematis, terpadu dan terarah serta tepat sasaran, agar apa yang menjadi tujuan dapat dicapai dan sesuai dengan harapan.

Untuk menjamin bahwa Renja telah menjabarkan Renstra SKPD dengan baik, maka perlu dilakukan Evaluasi. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD dilakukan setiap Tri Wulan sesuai dengan aliran dana dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun berjalan. Evaluasi Renja SKPD sangat perlu untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan program/kegiatan tahun berjalan. Hasil evaluasi selanjutnya dipakai sebagai bahan perbaikan program yang sedang berjalan dan dasar penyusunan Renja SKPD tahun berikutnya. Dalam Pemerintahan yang baik bukan semata-mata mengejar berapa uang yang diperoleh, untuk kegiatan pembangunan, tetapi sejauh mana lembaga dapat mempertanggungjawabkan penggunaan uang yang dibebankan kepadanya sehingga terwujud pemerintahan yang akuntabel. Akuntabilitas merupakan sebuah keharusan yang perlu dilaksanakan dalam usaha mewujudkan aspirasi

serta cita-cita masyarakat dalam mencapai masa depan yang lebih baik. Terkait dengan hal tersebut, maka dalam pertanggungjawaban keuangan menitikberatkan pada konsep akuntabilitas pada program/kegiatan yang strategis serta tidak mengesampingkan pentingnya pertanggungjawaban keuangan pada program/kegiatan non strategis sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang pelaksanaannya dijabarkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan dua kali mengalami perubahan yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 sebagai perubahan pertama atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, maka terjadi pemantapan kewenangan daerah. Selanjutnya pelaksanaan pengelolaan kewenangan/urusan daerah ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah.

Badan Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Perlindungan Anak Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 1 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah serta Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Tujuan evaluasi hasil RKPD adalah untuk memastikan dan menilai bahwa target program dan kegiatan prioritas daerah dalam RKPD dapat dicapai dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan jangka menengah daerah dan pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan tahunan nasional.

Evaluasi hasil RKPD dilaksanakan setiap triwulan oleh Kepala Bappeda dengan menggunakan hasil evaluasi Renja SKPD. Sehubungan dengan hal tersebut, Kepala SKPD wajib melaksanakan evaluasi hasil Renja SKPD setiap triwulan berdasarkan realisasi DPA SKPD.

Tujuan evaluasi hasil Renja SKPD adalah untuk menilai tingkat keberhasilan capaian target kinerja dan anggaran program/kegiatan Renja SKPD, guna mendukung pencapaian sasaran dan prioritas bidang pembangunan nasional tahun 2016. Dalam hal Renstra SKPD ditetapkan sebelum Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, evaluasi hasil Renja SKPD dapat dilakukan dengan membandingkan antara realisasi indikator target kinerja dan anggaran berdasarkan DPA SKPD dengan indikator target kinerja dan anggaran dalam Renja SKPD Tahun 2016.

## **1.2 TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

### **1.2.1 Tujuan Renja Badan Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Perlindungan Anak Provinsi Kepulauan Bangka Belitung**

Tujuan yang hendak dicapai oleh Badan Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Perlindungan Anak Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah :

1. Mengoptimalkan penerapan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Lembaga Masyarakat dalam pembangunan pemberdayaan perempuan.
2. Mengoptimalkan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan
3. Mengoptimalkan penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak
4. Mengoptimalkan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pemberdayaan keluarga dan keluarga berencana

### **1.2.2 Sasaran Renja Badan Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Perlindungan Anak Provinsi Kepulauan Bangka Belitung**

Sasaran dalam mencapai tujuan tersebut sebagai berikut :

1. Meningkatnya Penerapan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Pemberdayaan Lembaga Masyarakat (PLM) Dalam Pembangunan
2. Meningkatnya Kualitas Hidup dan Peran Perempuan disegala bidang Pembangunan
3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Penanganan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Berbagai Tindak Kekerasan dan Perdagangan Orang
4. Meningkatnya Akseptor KB dalam upaya mewujudkan keluarga kecil yang berkualitas

### **1.2.3. Indikator Kinerja Badan Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Perlindungan Anak Provinsi Kepulauan Bangka Belitung**

Indikator kinerja BPPKBPA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2017 terdapat pada tabel berikut :

**Tabel. 1.1**  
**INDIKATOR KINERJA**  
**BPPKBPA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**  
**TAHUN 2016**

<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>
(1)	(2)	(3)
1. Meningkatnya Penerapan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Pemberdayaan Lembaga Masyarakat (PLM) Dalam Pembangunan	1) Persentase SKPD yang melaksanakan PPRG	51,16% (22 dari 43 SKPD)
	2) Persentase SKPD yang memiliki data terpilah	23,2 % (10 dari 43 SKPD)
	3) Persentase Keberdayaan Organisasi dan Lembaga Masyarakat yang berbasis gender	7 Instansi Vertikal 42,42% (14 dari 33 lembaga)
2. Meningkatnya Kualitas Hidup dan Peran Perempuan disegala bidang Pembangunan	1) Persentase kebijakan peningkatan kualitas hidup perempuan, peran serta posisi perempuan	100 %
	2) Persentase Kelompok Usaha Ekonomi Perempuan yang mendapatkan bimbingan manajemen usaha dari BPPKBPA	13,59% (42 Klmp dari 309 Klmp)
	3) Persentase perempuan di lembaga pemerintahan	30,20 %
	4) Persentase partisipasi angkatan kerja perempuan	36,95 %
3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Penanganan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Berbagai Tindak Kekerasan dan Perdagangan Orang	1) Persentase perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	100 %
	2) Persentase kebijakan perlindungan perempuan dan anak	100 %
	3) Persentase Data terpilah terkait kesejahteraan anak	100 %
	4) Persentase kabupaten/kota yang membentuk Kota Layak Anak (KLA)	28,57% (2 dari 7 Kab/Kota)
	5) Persentase Anak yang mengikuti Forum Anak Tk. Nasional	15,58% (12 dari 77 Anak)
4. Meningkatnya Akseptor KB dalam upaya mewujudkan keluarga kecil yang berkualitas	1) Persentase kebijakan pemberdayaan keluarga dan Keluarga Berencana	100 %
	2) Tingkat Prevalensi Peserta KB Aktif	81,75%
	3) Persentase Keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera	10,95%

#### 1.2.4. PROGRAM DAN KEGIATAN

Pembangunan Pemberdayaan Perempuan diarahkan untuk mencapai sasaran peningkatan kualitas sumber daya manusia yang ditandai dengan meningkatnya IPM dan Indeks Pembangunan Gender (IPG) yang didukung oleh tercapainya penduduk tumbuh seimbang pada suatu

bangsa. Pencapaian sasaran tersebut ditentukan oleh terkendalinya pertumbuhan penduduk, meningkatnya UHH, meningkatnya rata-rata lama sekolah dan menurunnya angka buta aksara, meningkatnya kesejahteraan dan kualitas hidup anak dan perempuan, serta meningkatnya jati diri bangsa.

Dalam mewujudkan Visi dan Misi Badan Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Perlindungan Anak Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2012-2017 serta memperhatikan pencapaian Prioritas Nasional Bidang Pemberdayaan Perempuan, maka dalam periode 2012-2017 akan dilaksanakan strategi dengan fokus pada prioritas nasional bidang Pemberdayaan Perempuan yang dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan Badan Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Perlindungan Anak Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

**Tabel. 1.2**  
**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan BPPKBPA TA. 2016**

Kode Urusan Program/Kegiatan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Keg.
		Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
Bidang Urusan Pemberdayaan Perempuan								Rp 5.048.871.310	Rp 5.553.758.441		
Urusan Rutin								Rp 1.685.195.000	Rp 1.853.714.500		
1.11.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%					Rp 1.125.705.000	Rp 1.238.275.500		
1.11.01.01.01	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			1. Belanja Materai	800 Lembar	Kelancaran administrasi surat menyurat	100%	Rp 6.000.000	Rp 6.600.000		
1.11.01.01.01.0100	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			2. Belanja Paket Pengiriman	1 Paket						
				1. Belanja Telepon	12 Bulan	Terbayarnya telepon, listrik dan internet	12 Bulan	Rp 39.600.000	Rp 43.560.000		
				2. Belanja Internet							
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan			Tersedianya Jasa Administrasi Perkantoran	12 Bulan	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	12 Bulan	Rp 68.090.000	Rp 74.899.000		
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			Belanja Alat Kebersihan Kantor	12 Bulan	Terciptanya Kebersihan Kantor	100%	Rp 24.000.000	Rp 26.400.000		
	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja			Service Mesin Tik, Komputer, Mesin Fotocopy dan AC	1 Paket	Terlaksananya Perbaikan Peralatan Kerja	1 Paket	Rp 27.025.000	Rp 29.727.500		
	Penyediaan Alat Tulis Kantor			Belanja Alat Tulis Kantor	1 Paket	Tersedianya ATK	100%	Rp 60.200.000	Rp 66.220.000		
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Belanja Barang Cetakan dan Penggandaan	1 Paket	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	100%	Rp 32.980.000	Rp 36.278.000		
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Belanja Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Paket	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%	Rp -	Rp -		
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			Belanja Surat Kabar dan Lainnya	1 Paket	Terpenuhinya Bahan Bacaan	100%	Rp 14.520.000	Rp 15.972.000		

Kode Urusan Program/Kegiatan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Keg
		Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
Bidang Urusan Pemberdayaan Perempuan								Rp 5.048.871.310	Rp 5.553.758.441		
Urusan Rutin								Rp 1.685.195.000	Rp 1.853.714.500		
	Penyediaan Makanan dan Minuman			Belanja Makanan dan Minuman Tamu serta Rapat	1 Paket	Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman tamu serta rapat	100%	Rp 60.000.000	Rp 66.000.000		
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah			Belanja Perjalanan dinas	1 Paket	Tercapainya koordinasi dilingkungan pemberdayaan perempuan dengan pemerintah pusat	100%	Rp 300.000.000	Rp 330.000.000		
	Penyediaan Jasa Penunjang Pengelolaan Administrasi Perkantoran			Belanja Honorarium Tenaga Kontrak	13 Bulan	Terciptanya kinerja pegawai pengelola administrasi perkantoran secara optimal	13 Bulan	Rp 343.290.000	Rp 377.619.000		
	Koordinasi, Konsolidasi ke dalam daerah			Belanja Perjalanan dinas	1 Paket	Tercapainya koordinasi provinsi dan kab/kota	1 Paket	Rp 150.000.000	Rp 165.000.000		
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur	100%					Rp 140.420.000	Rp 154.462.000		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional			1. Kend. Roda 4 2. Kend. Roda 2	2 Unit 6 Unit	Kelancaran operasional kendaraan dinas	100%	Rp 140.420.000	Rp 154.462.000		
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya Disiplin Aparatur	100%					Rp 47.580.000	Rp 52.338.000		
	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya			PDH berserta perlengkapannya	42 Paket	Terpenuhinya Kebutuhan Pakaian Dinas Harian Beserta Kelengkapannya	42 Stel	Rp 19.620.000	Rp 21.582.000		
	Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu			Pakaian Khusus hari-hari tertentu	54 Paket	Terpenuhinya kebutuhan Pakaian Khusus hari-hari tertentu	54 Paket	Rp 27.960.000	Rp 30.756.000		



Kode Urusan Program/Kegiatan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Keg.
		Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
Bidang Urusan Pemberdayaan Perempuan								Rp 5.048.871.310	Rp 5.553.758.441		
Urusan Rutin								Rp 1.685.195.000	Rp 1.853.714.500		
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%					Rp 48.098.000	Rp 52.907.800		
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan			Peserta Bimbingan Teknis	5 Orang	Tersedianya SDM yang berkualitas	5 Orang	Rp 48.098.000	Rp 52.907.800		
	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Optimalnya Kualitas Manajemen yang Akuntabel dan Terintegrasi dalam Pembangunan Pemberdayaan Perempuan	100%					Rp 323.392.000	Rp 355.731.200		
	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan			1. Dokumen evaluasi kinerja (LAKIP, LPPD, LKPJ)  2. Dokumen Laporan Pelaksanaan Kegiatan APBD dan APBN	4 Dokumen  1 Dokumen	Optimalisasi kualitas penyusunan dokumen evaluasi dan pelaporan kinerja SKPD	100%	Rp 175.641.000	Rp 193.205.100		
	Rapat Koordinasi Penyusunan Rencana Kerja (Renja) BPPKBPA			Jumlah peserta Rakor Renja BPPKBPA	57 Orang	Optimalisasi sinkronisasi dan koordinasi pelaksanaan pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	80%	Rp 90.801.000	Rp 99.881.100		
	Pengembangan Sistem Informasi Pemperdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			Website BPPKBPA Prov. Kep. Bangka Belitung	1 Paket	Optimalisasi Sistem Informasi Pemperdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	80%	Rp 56.950.000	Rp 62.645.000		

Kode Urusan Program/Kegiatan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Keg
		Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
Bidang Urusan Pemberdayaan Perempuan								Rp 5.048.871.310	Rp 5.553.758.441		
Urusan Wajib								Rp 3.363.676.310	Rp 3.700.043.941		
1.11.01.20	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Lembaga Masyarakat	Persentase SKPD yang melaksanakan PPRG	51,16% (22 dari 43 SKPD)				Rp 282.702.000	Rp 310.972.200			
		Persentase SKPD yang memiliki Data Terpilah	21% (9 dari 43 SKPD) & 7 Instansi vertikal								
		Persentase Keberdayaan Organisasi dan Lembaga Masyarakat yang berbasis gender	42,42% (14 dari 33 lembaga)								
1.11.01.20.0100	Peningkatan Kapasitas dan Jaringan Kelembagaan Pemberdayaan Perempuan dan Anak			1. Jumlah Peserta Rakor yang paham tentang GFP PUG Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	50 Org	Optimalisasi pelaksanaan program dan rencana kerja GFP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	100%	Rp -	Rp -		
				2. Jumlah Peserta Rakor yang paham tentang Pokja PUG Prov. Kep. Bangka Belitung	50 Org	Optimalisasi pelaksanaan program dan rencana kerja GFP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	100%				
1.11.01.20.0200	Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak			Jumlah Buku Profil Gender Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	120 Buku	Jumlah SKPD yang memiliki data terpilah	9 SKPD	Rp 108.881.000	Rp 119.769.100		

Kode Urusan Program/Kegiatan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
		Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target			SKPD	Jenis Keg.
Bidang Urusan Pemberdayaan Perempuan								Rp 5.048.871.310	Rp 5.553.758.441		
Urusan Wajib								Rp 3.363.676.310	Rp 3.700.043.941		
1.11.01.20.0400	Pengembangan Materi dan Pelaksanaan KIE tentang Kesetaraan dan Keadilan Gender bagi Institusi Media massa			Jumlah peserta Pengembangan Materi dan Pelaksanaan KIE tentang Kesetaraan dan Keadilan Gender bagi Institusi Media massa	30 Org	Meningkatnya Partisipasi Institusi Media Massa di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	80%	Rp 110.620.000	Rp 121.682.000		
1.11.01.20.0700	Perencanaan Rencana Responsif Gender (Advokasi dan Pelatihan PPRG Provinsi Kepulauan Bangka Belitung)			Jumlah peserta advokasi dan pelatihan yang paham tentang PPRG	50 Org	Dokumen PPRG SKPD Provinsi Kep. Bangka Belitung	24 Dok	Rp 63.201.000	Rp 69.521.100		
1.11.01.21	Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan	Persentase kebijakan peningkatan kualitas hidup perempuan, peran serta posisi perempuan	100%					Rp 1.176.643.300	Rp 1.294.307.630		
		Persentase Kelompok Usaha Ekonomi Perempuan yang mendapatkan bimbingan manajemen usaha dari BPPKBPA	13,59% (42 Klmp dari 309 Klmp)								
		Persentase perempuan di lembaga pemerintahan	30,20%								
		Persentase partisipasi angkatan kerja perempuan	36,95%								

Kode Urusan Program/Kegiatan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Keg.
		Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
Bidang Urusan Pemberdayaan Perempuan								Rp 5.048.871.310	Rp 5.553.758.441		
Urusan Wajib								Rp 3.363.676.310	Rp 3.700.043.941		
1.11.01.21.0500	Pameran Hasil Karya Perempuan			Jumlah Kab/Kota yang mengikuti Pameran Hasil Karya Perempuan	7 Kab/Kota	Meningkatnya partisipasi angkatan kerja perempuan	70%	Rp 207.657.000	Rp 228.422.700		
1.11.01.21.0900	Operasional Kegiatan Dharma Wanita Persatuan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung			Rangkaian Kegiatan Dharma Wanita Persatuan Prov. Kep. Bangka Belitung	9 Kegiatan	Meningkatnya Peranan dan Kualitas Hidup Perempuan dibidang Pendidikan, Ekonomi dan Sosial Budaya	80%	Rp 458.825.000	Rp 504.707.500		
1.11.01.21.1300	Pembinaan Usaha Kelompok Ekonomi Perempuan Produktif			Jumlah Kelompok Keluarga Perempuan Miskin di kab/kota yang dilakukan Pembinaan Usaha Kelompok Ekonomi Perempuan Produktif	21 Kelompok	Meningkatnya kualitas hidup perempuan sekaligus mengentaskan kemiskinan desa melalui subsidi silang antar kelompok masyarakat yang ekonomi baik kepada masyarakat yang ekonomi lemah	80%	Rp -	Rp -		
1.11.01.21.1400	Advokasi Bidang Partisipasi Politik Perempuan			1. Kompilasi data terpilah bidang politik	1 Dokumen	Meningkatnya partisipasi perempuan dalam bidang politik	80%	Rp -	Rp -		
				2. Rekomendasi tentang upaya peningkatan partisipasi politik perempuan	1 Dokumen						
				3. Jumlah peserta yang paham tentang kedudukan perempuan dalam bidang politik	30 Orang						

Kode Urusan Program/Kegiatan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Keg.
		Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
Bidang Urusan Pemberdayaan Perempuan								Rp 5.048.871.310	Rp 5.553.758.441		
Urusan Wajib								Rp 3.363.676.310	Rp 3.700.043.941		
1.11.01.21.1500	Pendidikan dan Pelatihan Politik Perempuan			Jumlah Peserta Pendidikan dan Pelatihan Politik Perempuan	30 Orang	Meningkatnya kapasitas kader partai politik perempuan	80%	Rp 76.242.000	Rp 83.866.200		
1.11.01.21.1600	KIE Partisipasi Politik Perempuan			Jumlah Peserta yang Paham tentang pentingnya partisipasi politik perempuan	210 Orang	Meningkatnya partisipasi perempuan dalam bidang politik dan pengambilan keputusan	80%	Rp 135.982.300	Rp 149.580.530		
1.11.01.22	Program Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak	Persentase perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	100%					Rp 1.083.665.010	Rp 1.192.031.511		
		Persentase kebijakan perlindungan perempuan dan anak	100%								
		Persentase Data terpilah terkait kesejahteraan anak)	100%								
		Persentase kabupaten/kota yang membentuk Kota Layak Anak (KLA)	28,57% (2 dari 7 Kab/Kota)								

Kode Urusan Program/Kegiatan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Keg.
		Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
Bidang Urusan Pemberdayaan Perempuan								Rp 5.048.871.310	Rp 5.553.758.441		
Urusan Wajib								Rp 3.363.676.310	Rp 3.700.043.941		
		Persentase Anak yang mengikuti Forum Anak Tk. Nasional	15,58% (12 dari 77 Anak)								
1.11.01.22.0300	Penyusunan Profil Anak Provinsi Kepulauan Bangka Belitung			Jumlah Buku profil Kesejahteraan Perlindungan anak Prov. Kep. Bangka Belitung	70 Buku	Sebagai bahan dokumen perencanaan/penyusunan program/kegiatan bidang perlindungan anak	80%	Rp -	Rp -		
1.11.01.22.0400	Pembinaan Partisipasi Hak Anak			1. Peserta Forum Anak daerah tingkat provinsi	77 Orang	Terwujudnya mekanisme hak partisipasi anak	100%	Rp 230.038.000	Rp 253.041.800		
				2. Peserta Forum Anak Nasional dan Kongres Anak Indonesia	12 Orang						
1.11.01.22.1100	Workshop dan Fasilitasi Kebijakan Kab/Kota Layak Anak			Jumlah peserta workshop dan fasilitasi kebijakan Kab/Kota Layak Anak	40 Orang	Terwujudnya komitmen bersama untuk menciptakan kab/kota layak anak	80%	Rp 75.126.000	Rp 82.638.600		

Kode Urusan Program/Kegiatan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Keg.
		Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
Bidang Urusan Pemberdayaan Perempuan								Rp 5.048.871.310	Rp 5.553.758.441		
Urusan Wajib								Rp 3.363.676.310	Rp 3.700.043.941		
1.11.01.22.1400	Bimbingan Teknis Pelaporan SPM Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan			Jumlah Peserta Bimbingan Teknis Pelaporan SPM Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan	50 Orang	Meningkatnya pemahaman tentang tata cara pelaporan SPM Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan	100%	Rp 44.783.200	Rp 49.261.520		
1.11.01.22.1700	Operasional Kegiatan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)			Kegiatan-kegiatan P2TP2A	2 Kegiatan	Optimalisasi Peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dalam pelayanan masyarakat	80%	Rp 354.670.000	Rp 390.137.000		
1.11.01.22.1900	Peningkatan Fungsi Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung			Kelancaran Fungsi Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Prov. Kep. Babel	1 Kgt	Optimalisasi Fungsi Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Prov. Kep. Babel	1 Kgt	Rp 200.000.000	Rp 220.000.000		

Kode Urusan Program/Kegiatan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Keg
		Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
Bidang Urusan Pemberdayaan Perempuan								Rp 5.048.871.310	Rp 5.553.758.441		
Urusan Wajib								Rp 3.363.676.310	Rp 3.700.043.941		
1.11.01.23	Program Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Keluarga	Persentase kebijakan pemberdayaan keluarga dan Keluarga	100%					Rp 820.666.000	Rp 902.732.600		
		Tingkat prevalensi peserta KB aktif	81,75%								
		Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera	11,69%								
1.11.01.23.0200	Pembinaan dan Pelayanan Keluarga Berencana (Fasilitasi KB Muspida)			Jumlah masyarakat yang menerima pelayanan KB di 7 Kab/Kota	800 Orang	Meningkatnya Pencapaian Peserta KB baru dan peserta KB aktif pria di 7 Kab/Kota	100%	Rp 399.421.000	Rp 439.363.100		
1.11.01.23.0300	Pembinaan Peningkatan Peran Perempuan dalam Kehidupan Keluarga (HARGANAS)			Jumlah pemenang lomba dalam rangka Hari Keluarga	7 Kategori	Optimalisasi kebijakan pemberdayaan keluarga dan keluarga berencana menuju keluarga yang berkualitas	100%	Rp 376.613.000	Rp 414.274.300		
1.11.01.23.0600	Sosialisasi Reproduksi Sehat bagi Remaja			Jumlah peserta sosialisasi yang paham tentang reproduksi sehat bagi remaja	40 Orang	Optimalisasi kebijakan pemberdayaan keluarga dan keluarga berencana menuju keluarga yang berkualitas	100	Rp 44.632.000	Rp 49.095.200		



## BAB II

### EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA

#### 2.1 Perbandingan Antara Program/Kegiatan Dalam Renja dan Renstra SKPD

Perbandingan antara program/kegiatan dalam renja dan renstra Badan Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Perlindungan Anak Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah seperti pada tabel berikut :

**Tabel 2.1. Perbandingan antara program/kegiatan dalam renja dan renstra**

Kode Urusan Program/Kegiatan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	RENJA 2016	RENSTRA
<b>Urusan Rutin</b>			
1.11.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	1
1.11.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1	1
1.11.01.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	1	1
1.11.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1	1
1.11.01.07	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	1	1
<b>Urusan Wajib</b>			
1.11.01.20	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Lembaga Masyarakat	1	1
1.11.01.21	Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan	1	1
1.11.01.22	Program Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak	1	1
1.11.01.23	Program Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Keluarga	1	1

Dari tabel tersebut diatas dapat dijelaskan Perbandingan Antara Program/Kegiatan Dalam Renja dan Renstra BPPKBPA Prov. Kep. Bangka Belitung terdapat 5 program generik dan 4 program teknis dalam Renja dan Renstra BPPKBPA Prov. Kep. Bangka Belitung.

## 2.2 Capaian Target Kinerja Dan Penyerapan Dana

Capaian target kinerja dan penyerapan dana Program/Kegiatan BPPKBPA Prov. Kep. Bangka Belitung terlihat pada tabel 2.2. berikut ini.

**Tabel. 2.2. Capaian Target Kinerja dan Penyerapan Dana**

PROGRAM/KEGIATAN	PAGU	REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK
		Rp.	%	%
<b>TOTAL</b>	<b>Rp 5.048.871.310</b>	<b>Rp 4.833.626.386</b>	<b>95,74</b>	<b>100,00</b>
<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Rp 1.125.705.000</b>	<b>Rp 1.073.493.964</b>	<b>95,36</b>	<b>100,00</b>
Penyediaan Administrasi Surat-Menyurat	Rp 6.000.000	Rp 2.380.430	39,67	100,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 39.600.000	Rp 12.969.844	32,75	100,00
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Rp 68.090.000	Rp 68.000.000	99,87	100,00
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Rp 24.000.000	Rp 24.000.000	100,00	100,00
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Rp 27.025.000	Rp 26.215.000	97,00	100,00
Penyediaan Alat Tulis Kantor	Rp 60.200.000	Rp 60.000.000	99,67	100,00
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp 32.980.000	Rp 20.864.400	63,26	100,00
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp -	Rp -	0,00	0,00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Rp 14.520.000	Rp 14.440.000	99,45	100,00
Penyediaan Makanan dan Minuman	Rp 60.000.000	Rp 52.297.980	87,16	100,00
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	Rp 300.000.000	Rp 299.255.310	99,75	100,00
Penyediaan Jasa Penunjang Pengelolaan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp 343.290.000	Rp 343.200.000	99,97	100,00
Koordinasi dan Konsolidasi kedalam Daerah	Rp 150.000.000	Rp 149.871.000	99,91	100,00
<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Rp 140.420.000</b>	<b>Rp 114.572.300</b>	<b>81,59</b>	<b>100,00</b>
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Ops	Rp 140.420.000	Rp 114.572.300	81,59	100,00
<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>Rp 47.580.000</b>	<b>Rp 47.220.000</b>	<b>99,24</b>	<b>100,00</b>
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	Rp 19.620.000	Rp 19.620.000	100,00	100,00
Pengadaan Pakaian Khusus Hari Tertentu	Rp 27.960.000	Rp 27.600.000	98,71	100,00
<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>Rp 48.098.000</b>	<b>Rp 47.900.000</b>	<b>99,59</b>	<b>100,00</b>
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Rp 48.098.000	Rp 47.900.000	99,59	100,00
Peningkatan Kepribadian Bagi Perempuan	Rp -	Rp -	0,00	100,00
<b>Program Dukungan Manaj dan Pelaks Tugas Teknis Lainnya</b>	<b>Rp 323.392.000</b>	<b>Rp 311.806.500</b>	<b>96,42</b>	<b>100,00</b>
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Rp 175.641.000	Rp 172.655.000	98,30	100,00
Rapat Koordinasi Penyusunan Rencana Kerja (Renja) BPPKBPA TA. 2016	Rp 90.801.000	Rp 88.801.500	97,80	100,00
Pengembangan Sistem Informasi PP dan PA	Rp 56.950.000	Rp 50.350.000	88,41	100,00

PROGRAM/KEGIATAN	PAGU	REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK
		Rp.	%	%
<b>TOTAL</b>	<b>Rp 5.048.871.310</b>	<b>Rp 4.833.626.386</b>	<b>95,74</b>	<b>100,00</b>
<b>Program PUG &amp; PLM</b>	<b>Rp 282.702.000</b>	<b>Rp 268.336.000</b>	<b>94,92</b>	<b>100,00</b>
Peningkatan Kapasitas dan Jaringan Kelembagaan Pemberdayaan Perempuan dan Anak	Rp -	Rp -	0,00	0,00
Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak	Rp 108.881.000	Rp 107.867.000	99,07	100,00
Pengembangan Materi dan Pelaksanaan KIE tentang Kesetaraan dan Keadilan Gender bagi Institusi Media Massa	Rp 110.620.000	Rp 107.260.800	96,96	100,00
Advokasi dan Pelatihan PPRG Prov. Kep. Babel	Rp 63.201.000	Rp 53.208.200	84,19	100,00
<b>Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan</b>	<b>Rp 1.176.643.300</b>	<b>Rp 1.144.189.060</b>	<b>97,24</b>	<b>100,00</b>
Peningkatan Nilai-nilai Kejuangan Perempuan Indonesia	Rp 297.937.000	Rp 280.478.960	94,14	100,00
Pameran Hasil Karya Perempuan	Rp 207.657.000	Rp 201.914.400	97,23	100,00
Operasional Kegiatan DWP	Rp 458.825.000	Rp 455.765.000	99,33	100,00
Pembinaan Usaha Kelompok Ekonomi Perempuan Produktif	Rp -	Rp -	0,00	0,00
Advokasi Bidang Partisipasi Politik Perempuan	Rp -	Rp -	0,00	0,00
Pendidikan dan Pelatihan Politik Perempuan	Rp 76.242.000	Rp 73.886.200	96,91	100,00
KIE Partisipasi Politik Perempuan	Rp 135.982.300	Rp 132.144.500	97,18	100,00
<b>Program Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak</b>	<b>Rp 1.083.665.010</b>	<b>Rp 1.017.509.312</b>	<b>93,90</b>	<b>100,00</b>
Fasilitasi Upaya Perlindungan Perempuan dan Anak Terhadap tindak Kekerasan	Rp 131.858.000	Rp 111.973.600	84,92	100,00
Penyusunan Profil Kesejahteraan Perlindungan Anak	Rp -	Rp -	0,00	0,00
Pembinaan Partisipasi Hak Anak	Rp 230.038.000	Rp 230.038.000	100,00	100,00
Workshop dan Fasilitasi Kebijakan Kab/Kota Layak Anak	Rp 75.126.000	Rp 73.825.702	98,27	100,00
Sosialisasi UU PKDRT dan UU Perlindungan Anak	Rp 47.189.810	Rp 47.189.810	100,00	100,00
Bimbingan Teknis Pelaporan SPM Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan	Rp 44.783.200	Rp 41.044.200	91,65	100,00
Operasional Kegiatan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)	Rp 354.670.000	Rp 313.438.000	88,37	100,00
Peningkatan Fungsi Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Rp 200.000.000	Rp 200.000.000	100,00	100,00
<b>Program Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Keluarga</b>	<b>Rp 820.666.000</b>	<b>Rp 808.599.250</b>	<b>98,53</b>	<b>100,00</b>
Pembinaan dan Pelayanan Keluarga Berencana (Fasilitasi KB MUSPIDA)	Rp 399.421.000	Rp 393.070.200	98,41	100,00
Pembinaan Peningkatan Peran Perempuan dalam Kehidupan Keluarga (HARGANAS)	Rp 376.613.000	Rp 375.997.850	99,84	100,00
Sosialisasi Reproduksi Sehat Bagi Remaja	Rp 44.632.000	Rp 39.531.200	88,57	100,00

### BAB III

## KENDALA YANG DIHADAPI

Dalam konteks eksternal, terjadi perubahan dan tantangan strategis berupa berlangsungnya era globalisasi, perkembangan teknologi komunikasi dan informasi, transportasi yang mengarah pada terbentuknya dunia tanpa batas. Berbagai perubahan tersebut memberi dampak positif maupun negatif di bidang pemberdayaan perempuan. Dampak positif antara lain berupa berkembangnya teknologi dan ilmu baru, sedangkan dampak negatif yaitu berkembangnya pembangunan di Bangka Belitung yang mendorong para pelaku perdagangan manusia atau trafficking menjadikan Bangka Belitung sebagai salah satu tempat transit kejahatan, eksploitasi perempuan dan anak cukup memprihatikan, bahkan kasusnya cenderung meningkat. Kerjasama lintas sektoral untuk pemulangan korban perdagangan belum maksimal. Keputusan Presiden nomor 69 Tahun 2008 tentang pembentukan gugus tugas oleh Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat dan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dalam membantu daerah-daerah sebagai tempat transit. Bangka Belitung merupakan salah satu daerah yang sedang memproses pembentukan gugus tugas.

Beberapa factor penyebab maraknya kegiatan perdagangan manusia diantaranya : kurangnya pendidikan dan pengetahuan agama, perilaku konsumtif, rendahnya tingkat pendidikan, dan buruknya ekonomi keluarga, krisis moral. Upaya untuk mengantisipasinya adalah : penyediaan lapangan kerja yang memadai, kepedulian peran keluarga dan masyarakat.

Secara teknis, permasalahan yang terjadi dalam penanganan bagi perempuan dan anak korban kekerasan yaitu :

- Korban merasa malu untuk melapor ke UPT.
- Pelaporan dari kabupaten/kota tidak tepat waktu, tidak berkala.
- Proses pelaporan dari korban yang bukan penduduk asli mengalami kendala masalah kependudukan.
- Perlu waktu dalam proses di pengadilan sampai masalah selesai

- Daerah asal korban yang belum ada MOU dipulangkan oleh BPPKBPA, sedangkan daerah asal korban yang sudah ada MOU dijemput, sehingga terkadang ada keterlambatan
- Penyusunan anggaran untuk pemulangan korban dibuat pada tahun sebelum adanya korban sehingga terkadang biaya pemulangan tidak mencukupi.
- Alamat korban sulit untuk ditemukan.
- Korban belum memiliki identitas kependudukan karena masih dibawah umur.

Dari analisa perkembangan dan masalah pembangunan pemberdayaan perempuan diatas serta memperhatikan perkembangan dan tantangan dewasa ini. Penanganan terhadap masalah kekerasan terhadap perempuan dan anak di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah mengalami kemajuan yang cukup bermakna, namun belum optimalnya koordinasi lintas sector.

Dalam upaya penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terjadi dimasyarakat dikarenakan luasnya jangkauan serta rendahnya kesadaran masyarakat dalam memberikan laporan maka dilakukan sosialisasi, berkenaan dengan masalah dimaksud kepada masyarakat melalui media cetak maupun elektronik dengan harapan timbulnya kesadaran masyarakat untuk menyampaikan tindakan pelanggaran yang terjadi dilingkungannya kepada instansi atau lembaga yang berwenang. Adapun solusi yang perlu dilakukan adalah :

1. Meningkatkan pemahaman para pemangku kepentingan serta koordinasi pelaksanaan dan harmonisasi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan.
2. Meningkatkan kapasitas kelembagaan untuk kepentingan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak, peningkatan kapasitas penanganan dan penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak.
3. Meningkatkan koordinasi pelaksanaan dan penegakan hukum yang terkait dengan perlindungan bagi perempuan dan anak terhadap segala bentuk kekerasan dan diskriminasi

4. Meningkatkan kapasitas kelembagaan, ketersediaan data dan informasi, koordinasi pelaksanaan, dan harmonisasi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perlindungan perempuan dan perlindungan anak.
5. Meningkatkan kerjasama antar daerah yang meliputi penanganan orang, konsultasi dan bimbingan penampungan serta upaya pemulangan korban
6. Meningkatkan kualitas SDM sebagai tenaga mediator dan negosiator antara pemerintah daerah dengan korban dan Lembaga Masyarakat dengan menitikberatkan pada pemenuhan tanggung jawab negara pada hak asasi manusia dan pada pemulihan hak-hak korban.

Selain kendala yang dihadapi secara eksternal, terdapat juga kendala yang dihadapi secara internal yaitu :

1. Rasionalisasi anggaran yang harus dilakukan beberapa kali yang menyebabkan waktu pelaksanaan kegiatan dan target capaian kegiatan menjadi berubah.
2. Padatnya jadwal kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung juga mempengaruhi waktu pelaksanaan kegiatan lainnya.

## BAB IV

### PENUTUP

#### **4.1 Evaluasi**

Evaluasi Renja Badan Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Perlindungan Anak Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 sampai dengan akhir Tahun Anggaran dapat dikatakan baik dengan persentase realisasi keuangan mencapai 95,74 % walaupun ada beberapa kegiatan yang belum bisa terlaksana secara maksimal baik secara teknis maupun dikarenakan adanya rasionalisasi anggaran

Dengan tersusunnya Evaluasi Renja Badan Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Perlindungan Anak Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 ini, diharapkan dapat memberikan gambaran kinerja yang ingin dicapai tahun 2016 dan bermanfaat sebagai penjabaran pelaksanaan pemerintahan di tahun berikutnya.

#### **4.2 Rekomendasi**

Rekomendasi yang dapat diberikan untuk pelaksanaan Evaluasi Renja Badan Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Perlindungan Anak Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 adalah agar masing-masing bidang lebih fokus terhadap jadwal pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan pada awal tahun untuk menghindari pelaksanaan kegiatan yang menumpuk pada akhir tahun anggaran.

Agar pelaksanaan rasionalisasi anggaran dapat lebih melihat prioritas dari program/kegiatan masing-masing SKPD dan pertimbangan-pertimbangan lainnya agar proses rasionalisasi tidak berpengaruh banyak pada target capaian kinerja program/kegiatan tersebut.

Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia pada Badan Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Perlindungan Anak Provinsi Kepulauan Bangka Belitung juga perlu ditingkatkan agar program/kegiatan dapat dilaksanakan dengan maksimal.

Pangkalpinang, Januari 2017

Kepala Dinas  
Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak,  
Kependudukan Pencatatan Sipil dan  
Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana  
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Dr. dr. HENDRA KUSUMAJAYA, M.Epid  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19590117 199003 1 007



# LAMPIRAN